

# Orientasi Pembentukan Koalisi dan Fragmentasi Kepentingan dalam Penentuan Calon Wakil Bupati Ende Sisa Masa Jabatan 2019-2023

## *Orientation for Forming Coalitions and Fragmentation of Interests in Determining Candidates for Deputy Regent of Ende Remaining Term of Office 2019-2023*

Helenerius Ajo Leda\*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM)  
St.Ursula Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Diterima: 09 Januari 2023; Direview: 16 Januari 2023; Disetujui: 08 Februari 2023

\*Corresponding Email: [henajo66@gmail.com](mailto:henajo66@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan orientasi pembentukan koalisi partai pendukung Paket MJ pada Pilkada 2018, rivalitas elit partai koalisi ketika memperebutkan posisi jabatan Wakil Bupati Ende, beserta dengan berbagai kepentingan politik dibalik rivalitas yang terjadi. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dan konsep koalisi *Office-seeking*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, triangulasi dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi koalisi yang terbentuk dalam koalisi kemenangan Paket MJ pada Pilkada 2018 merupakan koalisi yang berbentuk *Office-seeking* yang cenderung pragmatis, mempertimbangkan elektabilitas dan popularitas kandidat. Koalisi yang berbentuk *office seeking* membuat konfigurasi koalisi yang mudah rapuh, pecah dan konfliktual, yang terbukti dengan adanya perbedaan sikap dan kepentingan politik dalam penentuan calon Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2023. Pertarungan elit dibalik perbedaan sikap elit terjadi karena elit partai politik bukanlah entitas tunggal yang apolitis tetapi terfragmentasi dalam berbagai faksi kepentingan baik secara internal maupun eksternal.

**Kata Kunci:** Koalisi; Fragmentasi Politik; Partai Politik; Kabupaten Ende

### Abstract

This article aims to describe the orientation of forming a coalition of parties supporting the MJ Package in the 2018 Pilkada, the rivalry of the coalition party elites when fighting for the position of Deputy Regent of Ende, along with the various political interests behind the rivalry that occurred. In order to approach this problem, references to the theory and concept of the *Office-seeking* coalition are used. This study uses a qualitative descriptive research method. Research data was collected through interviews, documentation, triangulation and analyzed qualitatively. The results of this study conclude that the orientation of the coalition formed in the MJ Package winning coalition in the 2018 Pilkada is an *office-seeking* coalition that tends to be pragmatic, considering the electability and popularity of the candidates. Coalitions in the form of *office seeking* create coalition configurations that are easily fragile, fragmented and conflictual, as evidenced by the differences in attitudes and political interests in determining the candidates for Deputy Regent of Ende for the remainder of the 2019-2023 term. The elite battle behind differences in elite attitudes occurs because political party elites are not a single, apolitical entity but are fragmented into various interest factions both internally and externally.

**Keywords:** Coalition; Political Fragmentation; Political Parties; Ende Regency

**How to cite:** Leda, H.A., (2023), Orientasi Pembentukan Koalisi dan Fragmentasi Kepentingan dalam Penentuan Calon Wakil Bupati Ende Sisa Masa Jabatan 2019-2023, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1); 2322-2330



## PENDAHULUAN

Pembentukan koalisi partai politik di era pilkada langsung merupakan suatu keniscayaan dan menjadi pilihan yang tak terelakan. Partai-partai politik yang hendak mengusung calon kepala daerah biasanya membangun aliansi dengan partai-partai lain dalam suatu koalisi. Hal ini dikarenakan tidak terdapat satupun partai politik yang memperoleh suara mayoritas, sehingga setiap partai harus membangun kerja sama dengan partai politik lain (Nadir, 2013). Selain karena minimnya kekuatan politik, koalisi niscaya dilakukan juga karena mandat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang menyebutkan bahwa, partai politik yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk koalisi (Pratama, 2017; Romli, 2017). Dengan begitu, partai yang memperoleh suara minoritas dapat memobilisasi kekuatan politik supaya kandidat yang diusung memperoleh dukungan yang lebih besar yang kemudian dapat terpilih saat pilkada (Abdar, 2018). Pilihan dalam pembentukan koalisi selanjutnya berimplikasi terhadap konfigurasi dan orientasi koalisi yang terbentuk. Terdapat dua kecenderungan pilihan koalisi partai politik yakni koalisi *office-seeking* dan koalisi *policy-seeking*. Model koalisi *Office-seeking* merupakan penggabungan beberapa partai politik dengan pertimbangan ingin mendapatkan kekuasaan atau jabatan-jabatan strategis dalam sebuah pemerintahan. Sedangkan koalisi model *policy-seeking* mendasarkan pertimbangan penggabungan beberapa partai politik karena mempertimbangkan keselarasan kebijakan partai, kesamaan ideologi dan program kegiatan partai politik (Prastya et al., 2021)

Di Indonesia, orientasi koalisi lintas partai politik dalam Pilkada langsung cenderung bersifat *Office-seeking*, yang pembentukan koalisi berdasarkan pertimbangan pragmatis seperti memburu jabatan, uang dan kekuasaan, tidak memperhatikan kesamaan ideologi ataupun platform partai, serta bersifat jangka pendek (Ekawati, 2019; Hendrawan et al., 2021; Nadir, 2013; Romli, 2017; Tjahjoko, 2015). Selain itu, pembentukan koalisi model *Office-seeking* cenderung bersifat *incidental (adh occoalition)*, yang pembentukannya terikat pada suatu agenda politik tertentu. Koalisi model ini akan bertahan lama jika masih ada kesamaan kepentingan di antara anggotanya, namun apabila terjadi perbedaan kepentingan, koalisi akan segera berakhir (Nadir, 2013; Suryani & Hanafi, 2018). Karena sifatnya yang pragmatis, koalisi *Office-seeking* adalah model koalisi yang rapuh, semu, rawan konflik dan mudah pecah. Seperti digambarkan oleh Lili Romly (2017) bahwa di era Pilkada langsung, perselisihan dan konflik dalam koalisi terjadi karena model pilihan koalisi yang cenderung pragmatis (Romli, 2017). Orientasi pragmatis dalam berkoalisi kemudian membuat hubungan antar elit politik dalam relasi kerjasama antagonis, dimana elit senantiasa berusaha untuk menciptakan konsensus melalui kerja sama meskipun pada akhirnya terdapat rivalitas di antara elit yang bersinggungan, begitupun sebaliknya elit akan mengakhiri konflik dan menciptakan konsensus jika memiliki persamaan kepentingan (Pradana, 2018).

Fenomena relasi kerjasama antagonistik terlihat pada gabungan tujuh partai koalisi (Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS, Nasdem dan PKPI) pendukung kemenangan kandidat Bupati Marselinus Y.W. Petu dan Wakil Bupati Djafar Achmad (Paket MJ) pada Pilkada Ende tahun 2018. Paket MJ memperoleh kemenangan 85.530 (61.90%) suara, sementara pasangan lawannya Paket WM (Don Bosco Wangge dan Haji Munawar H.Achmad) hanya mencapai 52.652 (38.10%) suara. Kemenangan Paket MJ secara resmi menandai periode kedua kepemimpinan Marsel Y.W. Petu dan Djafar Achmad untuk memimpin Kabupaten Ende periode 2018-2023. Akan tetapi kepemimpinan Bupati Marselinus Y.W. Petu tidak bertahan lama, pada bulan Mei 2019 Bupati Marselinus Y.W. Petu meninggal dunia. Enam bulan pasca wafatnya Bupati Marselinus Y.W. Petu, Wakil Bupati Djafar H. Achmad diangkat menjadi Bupati Ende pada 8 September 2019. Rotasi jabatan tersebut membuat posisi jabatan Wakil Bupati Ende mengalami kekosongan. Sebagaimana anjuran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada (Pasal 176 ayat 2) bahwa, partai koalisi harus bermufakat untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Ende dengan mengajukan (2) dua nama orang calon Wakil Bupati, yang kemudian akan dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Namun demikian dalam rentang waktu akhir 2019 hingga akhir 2021, ketujuh partai koalisi pendukung kemenangan Paket MJ tidak menghasilkan kesepakatan untuk mengusung dua (2) nama kader partai sebagai calon Wakil Bupati Ende. Dalam rentang waktu tersebut terjadi



perselisihan yang ditandai dengan terfragmentasinya elit-elit politik ke dalam dua blok politik, yaitu blok partai Golkar versus blok partai Nasdem, PDIP, Demokrat, PKB, PKS, KPPI. Perselisihan tersebut terjadi karena kedua blok politik memiliki obsesi politik untuk menempati posisi jabatan wakil Bupati Ende dengan mendorong kadernya asing-masing. Kutub partai Golkar mengusung dua kadernya yakni Herman Yosef Wadhi dan dr. Dominikus Mere. Sedangkan kutub enam partai (PDIP, Demokrat, PKB, PKS, NasDem, dan KPPI) mengusung Eriks Emanuel Rede (kader partai Nasdem) untuk menjadi calon Wakil Bupati Ende. Karena obsesi politik untuk menempati posisi jabatan wakil Bupati Ende, jumlah nama calon Wakil Bupati Ende melebihi ketentuan Pasal 176 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, sehingga kemudian membuat elit-elit kedua blok politik berada dalam situasi rivalitas (Leda, 2022). Dengan demikian, meskipun elit partai koalisi tampak bersatu padu dan sukses (kerja sama) memenangkan Paket MJ pada Pilkada Ende 2018, pada akhirnya kemudian berselisih dan berkonflik (antagonis) ketika merebut posisi jabatan Wakil Bupati Ende. Sebuah kerjasama dapat berubah menjadi rivalitas, jika ada kepentingan yang saling bertentangan, yang kemudian membuat elit-elit politik terfragmentasi dalam berbagai faksi.

Berbagai studi terdahulu tentang topik dan isu serupa telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. *Pertama*, kajian dan penelitian Luthfi Makhasin (2016) tentang Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. Berdasarkan temuan penelitiannya tersebut Luthfi Makhasin membagi empat tipologi koalisi yaitu Koalisi Kecil-Ideologis (KKI), Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), Koalisi Besar-Ideologis (KBI) dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP). Berdasarkan empat tipologi tersebut, Luthfi Makhasin menyimpulkan bahwa dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015 orientasi pembentukan koalisi yang berbasis ideologi maupun pragmatisme memainkan peran yang sama pentingnya sebagai pertimbangan dalam pembentukan koalisi (Makhasin, 2016).

*Kedua*, penelitian Moch. Nurhasim (2018) yang berjudul “Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018”. Penelitian ini mengungkap bahwa pola koalisi pada pilkada serentak 2018 menunjukkan gejala koalisi nano-nano yang bersifat variatif, campuran antara partai berideologi religius dan nasionalis. Koalisi nano-nano tersebut, pada akhirnya membentuk pola dan pendekatan baru yakni koalisi kartel (*cartel coalition*) yang merupakan sebuah koalisi yang dibentuk dalam rangka menghimpun kekuatan politik dari berbagai partai pendukung untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (Moch. Nurhasim, 2018).

*Ketiga*, penelitian oleh Mahpudin, Abdul Hamid, Shanty Kartika Dewi (2018) tentang Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pembentukan koalisi pada pilkada Banten 2017 merupakan koalisi yang cenderung pragmatis, elitis, oligarkis dan berorientasi *office seeking*, karena terbentuknya koalisi hanya pada upaya untuk maksimalisasi kekuasaan semata (Mahpudin et al., 2018).

*Keempat*, penelitian oleh Siti Khodijah dan Valina Singka Subekti (2020) tentang Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Lebak memiliki motif pragmatis. Koalisi dilakukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan perolehan suara partai politik menjelang pemilihan legislatif tahun 2019, yang kemudian koalisi yang terbentuk hanya memunculkan calon tunggal tanpa oposisi pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018 (Khodijah & Subekti, 2020).

*Kelima*, penelitian oleh Ainul Yaqin dan Sri Budi Eko Wardani (2021) tentang Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perbedaan ideologi dan bahkan ideologi yang bersebrangan di antara parau-partai politik membuat motif pembentukan koalisi berbasis platform dan kebijakan cenderung rendah, sehingga pada akhirnya koalisi terbentuk cenderung pada koalisi pragmatisme yang mempertimbangkan kekuasaan dan jabatan (Yaqin et al., 2021).

Berdasarkan hasil review terhadap penelitian terdahulu, artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian-kajian terdahulu diatas. Artikel ini sama-sama mengkaji tentang orientasi dan kecenderungan pembentukan koalisi dalam pilkada, namun perbedaannya artikel

ini bergerak lebih jauh yakni menyoroti motif terfragmentasinya partai politik pasca pilkada yakni ketika merespon pengisian jabatan Wakil Bupati Ende. Artikel ini juga akan menunjukkan kepentingan politik dibalik rivalitas elit dua blok partai koalisi dalam memperebutkan posisi jabatan Wakil Bupati Ende. Dengan demikian, artikel ini bertujuan menggambarkan orientasi partai politik dalam pembentukan koalisi pengusung Paket MJ pada Pilkada 2018 yang kemudian terfragmentasi ketika memperebutkan posisi jabatan Wakil Bupati Ende, beserta dengan berbagai kepentingan politik dibalik rivalitas elit yang terjadi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Sugiyono, 2010). Metode kualitatif ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui orientasi dan pertimbangan-pertimbangan yang menonjol bagi partai-partai dalam melakukan koalisi pengusung Paket MJ pada Pilkada 2018 dan motif terfragmentasinya partai politik pasca pilkada, ketika merespon pengisian jabatan Wakil Bupati Ende. Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Hasil Pilkada Ende 2018

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ende tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2018-2023. Dalam Pemilukada Kabupaten Ende tersebut diikuti oleh dua pasangan calon, diantaranya calon pertama Don Bosco Wangge yang berpasangan dengan Haji Munawar H.Achmad (Paket WM) yang didukung oleh partai Gerindra, Hanura dan PAN. Sedangkan calon kedua Marselinus Y.W Petu yang berpasangan dengan Haji Djafar H.Achmad (Paket MJ) diusung oleh partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PKS, Nasdem dan PKPI. Partai pengusung utama Paket WM adalah partai Gerindra, sedangkan partai pendukung Hanura dan PAN sebagai partai pendukung. Sedangkan partai pengusung utama Paket MJ adalah partai Golkar dan PDIP, pasalnya Marselinus Y.W Petu sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende kala itu, sedangkan Djafar H.Achmad merupakan kader partai PDIP Kabupaten Ende.

Sebagaimana mandat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang mensyaratkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dukungan partai politik pengusung Paket WM memperoleh 9 kursi (20%) yaitu Gerindra 4 kursi (13%), Hanura 3 kursi (10%) dan PAN 2 kursi (7%). Sedangkan partai politik pendukung Paket MJ memperoleh 21 kursi (80 %) di antaranya PKB 3 kursi (10%), PDI-P 4 kursi (13 %), Golkar 4 kursi (13 %), NasDem 4 kursi (13 %), PKS 2 kursi (7%), Demokrat 3 kursi (10%) dan PKPI 1 kursi (3%). Berdasarkan perolehan kursi partai politik di atas dapat dikatakan bahwa ketiadaan partai politik dengan 20% jumlah kursi di DPRD Kabupaten Ende pada pemilu 2014, kemudian mengharuskan partai politik untuk membangun aliansi dengan partai-partai lain dalam suatu koalisi.



**Tabel.1. Perolehan Kursi Partai Pendukung Paket MJ dan Paket WM**

Pasangan Calon	Dukungan Partai Politik	Jumlah Periode 2019	Kursi Prosentase Dukuangan (%)	Jumlah (%)	
Marselinus Y.W. Petu & H. Djafar Achmad (Paket MJ)	Partai Pengusung	PDI-P	4	13%	
		Golkar	4	13%	
	Partai Pendukung	PKB	3	10%	80%
		NasDem	4	13%	
		PKS	2	7%	
		Demokrat	3	10%	
Don Bosco M. Wangge & H.Munawar.A Achmad (Paket WM)	Partai Pengusung	Gerindra	4	13%	
		Partai Pendukung	Hanura	3	10%
PAN	2		7%		
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Sumber: Diolah dari Data KPUD Kab.Ende Tahun 2018

Pertarungan antara kedua paket dalam Pilkada 2018 cukup memanas. Pasalnya kedua paket tersebut pernah bertarung pada Pilkada 2013 yang hasilnya dimenangkan oleh Paket MJ (Marselinus Y.W. Petu dan H. Djafar H. Achmad). Kemenangan Paket MJ sempat digugat oleh Don Bosco M. Wangge yang saat itu berpasangan dengan Dominikus Minggu Mere. Kandidat Don Bosco M. Wangge mengugat keputusan KPUD Kabupaten Ende ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kemenangan Marselinus Y.W. Petu, yang disinyalir penuh dengan kecurangan dan pelanggaran (Toulwala, 2021). Meskipun sensasi politik cukup memanas yang diakibatkan oleh pertarungan kedua paket tersebut, namun tidak menghadirkan gejolak sosial politik di tengah masyarakat.

**Tabel.2. Perbandingan Perolehan Sura dalam Pilkada Ende 2018**

Dapil	Perolehan Suara Paket WM	Perolehan Suara Paket MJ
Dapil Ende 1	14.817	29.307
Dapil Ende 2	4.767	25.073
Dapil Ende 3	14.009	11.323
Dapil Ende 4	19.059	19.827
<b>Total</b>	<b>52.652</b>	<b>85.530</b>

Sumber: Diolah dari Data KPUD Kab.Ende Tahun 2018

Dukungan masyarakat terhadap Paket MJ kemudian membuat Paket MJ menang telak 85.530 (61.90%) suara, sementara pasangan Don Bosco Wangge dan Haji Munawar H.Achmad hanya mencapai 52.652 (38.10%) suara. Paket MJ menang di dua dapil, yakni dapil Ende 1 dengan jumlah 29.307 suara dan dapil Ende 2 dengan jumlah 25.073 suara. Sedangkan dapil Ende 3 dimenangkan oleh Paket WM dengan jumlah 14.009, dan dapil 4, Paket MJ menang tipis dari Paket WM dengan selisih 768 suara. Kemenangan Paket MJ secara resmi menandai periode kedua kepemimpinan Ir. Marsel Y.W. Petu dan Djafar Achmad untuk memimpin Kabupaten Ende periode 2018-2023.

## Orientasi Pembentukan Koalisi Partai Politik Pengusung Paket MJ

Pembentukan koalisi partai politik merupakan salah satu langkah awal yang cukup penting dalam proses pengusung calon kepala daerah. Ketiadaan kekuatan salah satu partai politik yang dominan dengan memperoleh suara mayoritas, membuat patri-partai politik harus membangun kerja sama dalam koalisi. Biasanya kekuatan politik dihitung dari komposisi perolehan kursi dalam lembaga legislatif (DPRD). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa partai-partai yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk koalisi. Dengan demikian, komposisi jumlah perolehan kursi dalam lembaga legislatif (DPRD) sangat menentukan pembentukan koalisi diantara partai-partai politik.

Dalam konteks Pilkada Ende Tahun 2018, jika mencermati proesestase jumlah kursi di DPRD kedua partai pengusung utama Paket MJ yaitu Golkar dan PDIP (Tabel.1) sebesar 26%, melebihi ketentuan minimal Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Hal ini berarti, kedua partai pengusung utama Paket MJ (Golkar dan PDIP) bisa saja mengajukan dukungan terhadap Paket MJ tanpa berkoalisi dengan partai lain. Begitu pun sebaliknya, partai-partai lain bisa memilih untuk tidak berkoalisi dengan partai pengusung utama Paket MJ dan membentuk koalisi sendiri mengusung kandidat lain. Berpijak pada hal tersebut, tentunya partai politik memiliki bermacam-macam pertimbangan dan orientasi untuk melakukan koalisi untuk mendukung Paket MJ dalam Pilkada Ende 2018.

Berdasarkan penuturan beberapa narasumber bahwa, pembentukan koalisi didasarkan oleh beberapa pertimbangan, Pertama: koalisi membutuhkan kekuatan besar agar Paket MJ dapat memenangkan Pilkada Ende, karena tidak ada partai dengan posisi dominan di lembaga DPRD Ende, sehingga jika dengan koalisi besar kita bisa menguasai kedudukan di pemerintahan, dan partai-partai yang berkoalisi bisa mesuport kerja-kerja pemerintah lewat lembaga legislatif (Wawancara tim pemengangan Paket MJ 2018/2023). Pernyataan Tim Pemengangan Paket MJ di atas mengkonfirmasi penuturan Marselinus YW Petu saat mendaftar di KPU Ende tanggal 09 Januari 2018 silam, bahwa “dengan dukungan partai pengusung yang memiliki 21 kursi, Paket MJ yakin akan meraih kesuksesan” (mediantt.com, 2018). Dengan demikian, partai pengusung utama Paket MJ (Golkar dan PDIP) menambah kekuatan dengan menggalang dukungan dari berbagai partai politik untuk mengusung pencalonan MJ menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende.

Kedua, pertimbangan para aktor politik mengusung Paket MJ, bahwa angka survei elektabilitas dan jejaring politik yang dimiliki Paket MJ jauh melampaui paket lawan (Wawancara tim pemengangan Paket MJ 2018/2023). Elektabilitas Paket MJ berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2017 menunjukkan Calon Bupati Ende untuk periode 2018/2023 yang unggul adalah Marsel Y.W. Petu dengan elektabilitas 52,3%. Jarak dengan pesaing terdekatnya Don Bosco M. Wangge sebesar 40,5%. Sedangkan Calon Wakil Bupati yang unggul adalah Djafar H. Ahmad dengan elektabilitas 55,2% (LSI, 2017). Di samping itu, faktor jejaring politik yang dimiliki Paket MJ yang telah diperkuat selama memimpin Ende pada periode sebelumnya dengan membangun relasi struktural antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa semasa kepemimpinannya periode 2013-2018 (Toulwala, 2021).

Ketiga, pembentukan koalisi pendukung Paket MJ sebagai respons terhadap dinamika politik yang terjadi saat pilkada 2018. Pasalnya Paket MJ memiliki obsesi politik untuk membentuk koalisi besar dengan “memborong” semua partai-partai politik untuk mendukungnya sebagai Cabub dan Cawabub Ende (Wawancara tim pemengangan Paket MJ 2018/2023). Berdasarkan temuan penelitian Richard B Toulwala (2021) bahwa, obsesi politik Paket MJ untuk menang dalam Pilkada 2018 tidak terlepas dari dinamika pertarungan antara Marselinus Y.W. Petu versus Don Bosco M. Wangge dalam Pilkada 2013 silam yang cukup memanas. Hasil Pilkada 2013 lalu dimenangkan oleh Marselinus Y.W. Petu digugat oleh Don Bosco M. Wangge karena keberatan terhadap keputusan KPUD Kabupaten Ende atas kemenangan Marselinus Y.W. Petu, yang disinyalir ada beberapa temuan kecurangan (Toulwala, 2021). Karena itu, frasa “memborong semua partai-partai politik” sebagaimana dinyatakan di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk blokade politik paket MJ terhadap Paket WM dalam pertarungan Pilkada 2018.



Orientasi pembentukan koalisi Paket MJ dalam Pilkada 2018, mengisyaratkan bahwa koalisi merupakan arena bagi para politisi untuk mempertimbangkan kekuatan politik untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan politik. Dalam konteks seperti ini, pimpinan partai politik akan menentukan pilihannya dengan bermacam-macam pertimbangan politik demi mencapai tujuannya. Pertimbangan pembentukan koalisi partai dalam Pilkada Ende 2018 menunjukkan bahwa, koalisi besar dengan ikatan pragmatis rasional menjadi pilihan sebagai orientasi dalam pembentukan koalisi dengan partai politik berperan sebagai mesin politik untuk memobilisasi suara masa (voters).

### **Fragmentasi Kepentingan Elit Partai Politik Dalam Penentuan Calon Wakil Bupati Ende**

Kemenangan Paket MJ dengan modal dukungan koalisi besar yang mampu memobilisasi massa (voters) mencapai 61,90 % suara, mengantarkan Marsel Y.W. Petu dan Djafar Achmad untuk memimpin Kabupaten Ende periode 2018-2023, yang secara resmi dilantik pada 7 April 2019. Namun setelah sebulan menjabat, pada bulan Mei 2019 Bupati Marselinus Y.W. Petu meninggal dunia. Wafatnya Bupati Marselinus Y.W. Petu, menyebabkan Wakil Bupati Djafar H. Achmad diangkat menjadi Bupati Ende pada 8 September 2019. Rotasi jabatan tersebut pada akhirnya membuat posisi jabatan Wakil Bupati Ende mengalami kekosongan. Masing-masing partai memiliki obsesi untuk menempati kadernya sebagai calon Wakil Bupati. Obsesi politik tersebut yang kemudian membuat kerjasama partai koalisi disaat pilkada berubah menjadi rivalitas dalam dua blok politik. Rivalitas elit-elit politik dalam pengusulan jumlah nama calon Wakil Bupati Ende, menyimpan sejumlah kepentingan politik baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang kemudian membuat elit partai politik bukan sebagai entitas tunggal, tapi terfragmentasi dalam berbagai faksi baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, fragmentasi kepentingan elit partai politik dalam penentuan calon Wakil Bupati Ende berkaitan dengan kepentingan jangka panjang maupun kepentingan jangka pendek yakni persiapan pilkada Ende dan Pilbub NTT tahun 2024 dan kepentingan pemilu legislatif tahun 2024.

Dua figur yang diusung oleh blok politik partai Golkar yakni Herman Yosef dr. Dominikus Mere, merupakan Calon Bupati Ende dalam kontestasi pilkada 2024 mendatang. Karenanya, partai Golkar menjagokan kedua figur ini sebagai calon Wakil Bupati Ende. Sosok Herman Yosef Wadhi adalah seseorang yang telah lama membesarkan Golkar Kabupaten Ende, sekaligus sebagai ketua DPD II partai Golkar Ende menggantikan almarmum Marselinus Y.W. Petu. Herman Yosef Wadhi juga pernah menjadi anggota dan Ketua DPRD Ende periode 2009-2014. Sedangkan dr. Dominikus Mere merupakan seorang birokrat, mantan Kadis Kesehatan Propinsi NTT, dan juga pernah menjadi calon Wakil Bupati Ende pada Pilkada tahun 2013 dan Pilkada 2018.

Dalam kubu partai Golkar peran elit Golkar Propinsi (DPD II) dan elit Pusat pusat (DPP) cukup dominan dalam dinamika pengusungan nama calon Wakil Bupati Ende. Ada dua figur sebagai merepresentasi partai Golkar Pusat (DPP) dan DPD II NTT, yaitu Melchias Markus Mekeng (DPP) dan Emanuel Melkiades Laka Lena (DPD NTT). Melchias Markus Mekeng merupakan anggota DPR-RI selama empat periode sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2019. Sedangkan Melkiades Laka Lena merupakan anggota DPR-RI periode 2019-2024, dan juga pernah menjadi calon Wakil Gubernur NTT pada Pilgub tahun 2013. Meskipun serumpun dalam partai Golkar, kedua figur ini memiliki kepentingan politik yang berbeda, sebagaimana dituturkan lebih lanjut oleh Herman Yosef Wadhi bahwa Golkar NTT "tidak bisa melawan" Golkar Pusat, untuk urusan Golkar NTT itu pasti Melchias Markus Mekeng, walaupun memang Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai ketua DPD NTT, tetapi ia tidak bisa melawan Melchias Markus Mekeng (Wawancara dengan Herman Yosef Wadhi). Dengan demikian frasa "tidak bisa melawan" dalam petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa terjadi fragmentasi dalam internal partai Golkar, antar elit Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NTT dan elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam merespon isu pengisian jabatan calon Wakil Bupati.

Sementara itu, blok politik enam partai koalisi yang menjagokan kader Partai Nasdem sebagai calon Wakil Bupati Ende yakni Erikos Emanuel Rede juga sebagai mantan anggota DPRD Ende periode 2013-2018 dan Wakil Ketua DPRD Ende periode 2018-2024. Pencalonan Erikos Emanuel Rede pun tidak lepas dari intervensi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Gubernur



Viktor Laiskodat adalah orang penting DPP partai Nasdem, sekaligus Ketua Nasdem NTT, pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dua periode. Dalam rentang waktu 2020 hingga 2021, istri Gubernur Viktor Laiskodat, Julie Sutrisno Laiskodat yang juga sebagai anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Koordinator Wilayah (Korwil) Bali-Nusra Partai Nasdem, intensif melakukan komunikasi politik lintas partai. Sebagaimana pernyataan Julie Sutrisno Laiskodat di beberapa media bahwa, "partai Nasdem nyatakan siap 'perang' dalam ajang kontestasi pemilihan Wakil Bupati Ende, dan kesiapan itu sudah dilakukan sejak tahun 2020" (Voxntt,2020; floresku.com, 2021).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, meskipun di saat Pilkada koalisi tampak bersatu padu dan sukses memenangkan Paket MJ, namun kemudian partai koalisi terfragmentasi dalam dua blok politik ketika memperebutkan posisi jabatan Wakil Bupati Ende. Rivalitas di antara elit politik disebabkan karena elit politik memiliki kepentingan yang sama yakni memburu posisi jabatan Wakil Bupati Ende, sekaligus sebagai investasi politik jangka panjang dalam persiapan Pilbub Ende, Pilgub NTT dan Pileg tahun 2024 mendatang. Rivalitas dan fragmentasi partai koalisi mempengaruhi perilaku elit-elit partai ketika berhadapan dengan elit-elit partai lain karena hal ini memiliki pengaruh dalam proses bargaining dalam mempertahankan kepentingan.

## SIMPULAN

Bercermin dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa orientasi dan pertimbangan pembentukan koalisi memiliki implikasi politis terhadap konfigurasi koalisi. Orientasi koalisi yang terbentuk dalam koalisi kemenangan Paket MJ dalam pilkada 2018 merupakan koalisi yang berbentuk *Office-seeking* yang cenderung mengandalkan jumlah yang besar, berorientasi jangka pendek dan pragmatis. Selain itu, keutamaan pembentukan koalisi hanya sebatas menggalang dukungan partai politik untuk menambah kekuatan politik dalam satu blok koalisi untuk menghadapi Pilkada. Begitu pun motif partai dalam berkoalisi cenderung mempertimbangkan elektabilitas dan popularitas kandidat. Koalisi yang terbentuk atas dasar *office seeking* kemudian membuat konfigurasi koalisi yang mudah rapuh, konfliktual dan cenderung sulit menjaga keutuhan koalisi. Karena elit partai politik bukanlah entitas tunggal yang apolitis tetapi terfragmentasi dalam berbagai faksi kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Hal inilah yang terjadi dalam koalisi partai politik di Kabupaten Ende ketika merespon pengisian jabatan Wakil Bupati Ende. Watak pembentukan koalisi yang berlandaskan pada kepentingan jangka pendek dan pragmatis (*Office-seeking*), kemudian membuat koalisi dengan mudah retak dan pecah. Terbukti dengan adanya perbedaan sikap dan kepentingan politik dalam penentuan calon Wakil Bupati Ende. Perbedaan sikap politik tersebut yang kemudian menyebabkan pembelahan yang mengerucut pada dua kutub berlawanan, karena masing-masing kutub partai koalisi memiliki kepentingan politik baik kepentingan jangka pendek maupun kepentingan jangka panjang. Demikian pertarungan elit dalam politik terjadi karena elit partai politik bukanlah entitas tunggal yang apolitis tetapi terfragmentasi dalam berbagai faksi kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Karena dalam politik tidak ada lawan ataupun kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdar, Y. (2018). KOALISI PARTAI POLITIK DALAM UU NO 10 TAHUN 2016. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 11-17.
- Ekawati, E. (2019). Peta Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2680>
- Hendrawan, A., Berenschot, W., & Aspinall, E. (2021). Parties as pay-off seekers: Pre-electoral coalitions in a patronage democracy. *Electoral Studies*, 69, 102238. <https://doi.org/10.1016/J.ELECTSTUD.2020.102238>
- Khodijah, S., & Subekti, V. S. (2020). Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 177-187. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.111>



- Leda, H. A. (2022). Perbedaan Sikap Partai Koalisi dalam Pengisian Sisa Masa Jabatan Wakil Bupati Ende Periode 2018-2023. *Literatus*, 4(1), 69–74. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.654>
- LSI. (2017). *SUMMARY SURVEI NTT RAYA*. 4(1), 88–100.
- Mahpudin, Hamid, A., & Dewi, S. K. (2018). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018*, 108–130. [http://repository.fisip-untirta.ac.id/956/1/naskah 9.pdf](http://repository.fisip-untirta.ac.id/956/1/naskah%209.pdf)
- Makhasin, L. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 234–250. <https://doi.org/10.22146/jsp.15685>
- Moch. Nurhasim, D. (2018). Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(No 2), 129–142.
- Nadir, S. T. dan S. (2013). KOALISI POLITIK DI INDONESIA PASCA SOEHARTO. *Jurnal Review Politik*, 03, 256–278.
- Pradana, M. A. (2018). The Pseudo Rivality of Political Elites in The Governor Election East Java Province in 2018. *Literatus*, 3(1), 10–22.
- Pradoko, S. (2017). Paradigma Metode Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta*. UNY Press.
- Prasty, D. E., Purwaningsih, T., & Qodir, Z. (2021). Political Party Pragmatism: The Emergence of Single Pair in Ngawi Regency Head Election. *Jurnal Magister Administrasi Publik (JMAP)*, 2(1), 2021. <https://doi.org/10.31629/jmap.v1i2.3592>
- Pratama, H. M. (2017). Melihat Model Koalisi Partai Politik di 6 Provinsi Pilkada Serentak 2017. *Jurnal Pemilu & Demokrasi, Pemilu dan Demokrasi*, 79–93.
- Romli, L. (2017). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi Coalition and Internal Party Conflicts of Reform Era in Indonesia. *Politica*, 8(2), 95–118. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1138>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (p. 334). Bandung. CV.Alfabeta.
- Suryani, D., & Hanafi, N. L. A. R. I. (2018). Menuju Pilkada Sebagai Bagian Pemilu Serentak Lokal. *Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik-LIPI)*, 16.
- Tjahjoko, G. T. (2015). *Politik Ambivalensi: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada* (U. N. Ni'mah (ed.); 1st ed.). Research Centre of Politics and Government (PolGov).
- Toulwala, R. B. (2021). Analisis Perubahan Dukungan Politik dan Perilaku Memilih di Desa Wolotopo Timur dalam Pilkada Kabupaten Ende 2018. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 5384–5389. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1841>
- Yaqin, M. A. dan S. B. E. W. (2021). Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(1), 75.
- Mediantt.com. (2018). Tujuh Parpol Antar Paket MJ Daftar ke KPU Ende <https://www.mediantt.com/2018/01/09/tujuh-parpol-antar-paket-mj-daftar-ke-kpu-ende/>
- Voxntt.com. (2020). Isi Kursi Wabup Ende, NasDem akan Bangun Komunikasi Politik Antarpartai Koalisi <https://voxntt.com/2020/10/18/isi-kursi-wabup-ende-nasdem-akan-bangun-komunikasi-politik-antarpartai-koalisi/71238/>
- Floresku.com. (2021). Terkait Wakil Bupati, Julie Sutrisno Laiskodat: Partai Nasdem Siap 'Perang' <https://floresku.com/read/terkait-wakil-bupati-julie-sutrisno-laiskodat-partai-nasdem-siap-perang>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

